

## DAMPAK TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PT PERTAMINA BAGI MASYARAKAT

Arya Sheva<sup>1</sup>, Chris Jericho<sup>2</sup>, Sandy Dwi Kurniawan<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Bandar  
Lampung

Email: [shevaarya64@gmail.com](mailto:shevaarya64@gmail.com)<sup>1</sup>, [jerryjerry00900@gmail.com](mailto:jerryjerry00900@gmail.com)<sup>2</sup>, [sandydk766@gmail.com](mailto:sandydk766@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*The alleged corruption case at Pertamina that caused state losses of Rp193.7 trillion is one of the biggest scandals in the history of Indonesian BUMN. This scandal not only tarnished the name of one of the largest State-Owned Enterprises (BUMN) in Indonesia, but also had a significant impact on various sectors of people's lives, especially in the economic, social, and public trust aspects of the government. This article uses a literature study method from various secondary sources, including BPK audit reports, national media coverage, and academic studies. The results of the study show that the main impacts of this corruption include disruption of energy subsidies, increasing fuel prices, and reduced budget allocations for vital sectors such as education and health. In addition, the lower classes are the most affected due to the increasing economic burden. Low transparency and weak internal supervision within BUMN are the main factors that allow this corrupt practice to occur. Therefore, strengthening the governance system, public transparency, and law enforcement are the main solutions to prevent similar incidents in the future.*

**Keywords:** Corruption, Pertamina, state losses, socio-economic impacts, BUMN, transparency, public trust.

### ABSTRAK

Kasus dugaan korupsi di Pertamina yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah BUMN Indonesia. Skandal ini bukan hanya mencoreng nama salah satu Badan Usaha

### Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Milik Negara (BUMN) terbesar di Indonesia, tetapi juga berdampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan rakyat. Khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Artikel ini menggunakan metode studi literatur dari berbagai sumber sekunder, termasuk laporan audit BPK, pemberitaan media nasional, dan kajian akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa dampak utama korupsi ini mencakup terganggunya subsidi energi, meningkatnya harga bahan bakar, serta berkurangnya alokasi anggaran untuk sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, masyarakat kecil menjadi pihak paling terdampak karena meningkatnya beban ekonomi. Rendahnya transparansi dan lemahnya pengawasan internal di tubuh BUMN menjadi faktor utama yang memungkinkan praktik korupsi ini terjadi. Oleh karena itu, penguatan sistem tata kelola, transparansi publik, dan penegakan hukum menjadi solusi utama untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

**Kata Kunci:** Korupsi, Pertamina, kerugian negara, dampak sosial ekonomi, BUMN, transparansi, kepercayaan publik.

## I. PENDAHULUAN

Kehidupan korupsi dalam konteks pelayanan publik ini merupakan perbuatan "korupsi administrasi" dengan fokus pada kegiatan perorangan yang memegang kontrol dalam kedudukannya sebagai pejabat publik, sebagai pembuat kebijakan atau sebagai pegawai birokrasi pemerintah, atas berbagai kegiatan atau keputusan. Dengan makin meluasnya proyek swastanisasi perusahaan negara dan pengalihan kegiatan yang selama ini dipandang masuk dalam lingkup tugas pemerintah ke sektor swasta, dan monopoli penuh atau setengah penuh penyediaan barang publik oleh sektor swasta (misalnya: air, listrik, telkom), maka perbuatan korupsi telah merambah juga pada sektor swasta di luar dan di dalam hubungan kerja sektor swasta dengan sektor publik, sehingga perbuatan korupsi kedua sektor ini membawa dampak negatif terhadap kepentingan publik. Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian negara dan menghambat pembangunan nasional terutama pembangunan kampung atau desa, sehingga harus di berantas karena dapat menghambat pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang merugikan negara secara finansial, dan merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, terdapat kasus

---

<sup>1</sup> Alfarrizy, Bambang Hartono dan, Zainudin Hasan. 2021. IMPLEMENTASI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAH GUNAAN ANGGARAN PENDAHULUAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK) YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MANTAN KEPALA KAMPUNG MENANGA JAYA (STUDI KASUS NOMOR:13/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK), hal.4.

korupsi yang melibatkan perusahaan milik negara (BUMN) seperti PT Pertamina yang menjadi perhatian besar, terlebih ketika nilai kerugian negara mencapai angka yang sangat besar, yakni sekitar Rp193,7 triliun.<sup>2</sup> Dampak dari kasus ini tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat. Praktik oplosan bahan bakar, seperti pencampuran Peralite RON 90 dengan Pertamax RON 92, telah merugikan konsumen hingga Rp47 miliar per hari atau sekitar Rp17,4 triliun per tahun. Selain itu, kepercayaan publik terhadap Pertamina menurun, dan masyarakat menanggung beban ekonomi akibat kenaikan harga BBM serta potensi kerusakan kendaraan akibat kualitas bahan bakar yang buruk.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas Inilah Rumusan Masalah Yang Kami Ambil:

1. Bagaimana dampak kerugian negara akibat kasus korupsi pertamina terhadap kesejahteraan masyarakat?

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian kepustakaan, atau disebut juga penelitian literatur, adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun informasi dari berbagai sumber tertulis yang sudah ada sebelumnya. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan menggunakan referensi dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, serta sumber daring yang kredibel. Metode ini sangat bermanfaat untuk menggali pengetahuan peneliti. sebelum memahami kerangka teoritis dan mendukung sintesis dan analisis dalam penelitian kepustakaan adalah langkah-langkah umum yang digunakan dalam metode penelitian kepustakaan untuk membangun landasan teoritis, metode penelitian kepustakaan sangat berguna serta membangun argumen yang logis dan berbasis teori. Sehingga peneliti dapat memahami kemajuan ilmu di bidang tertentu, dan menemukan penelitian yang dapat di pelajari lebih lanjut<sup>4</sup>.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak kerugian negara akibat kasus korupsi pertamina terhadap kesejahteraan masyarakat dapat terlihat dari menurunnya kemampuan negara dalam menyediakan subsidi dan layanan publik. Hilangnya dana negara sebesar Rp. 193,7 triliun membuat alokasi anggaran untuk kebutuhan besar masyarakat ikut terpengkas seperti subsidi energi, kesehatan, dan pendidikan<sup>5</sup>. Masyarakat kecil atau yang berpenghasilan rendah juga menjadi kelompok paling merasakan dampak dari kerugian ini, karena mereka sangat bergantung pada bantuan

---

<sup>2</sup> Mulya, H. (2022). *Korupsi dan Dampaknya terhadap Perekonomian Negara*. Bandung: Refika Aditama. Menjelaskan secara konseptual bagaimana korupsi merusak sistem ekonomi dan sosial.

<sup>3</sup> Dugaan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun akibat korupsi di Pertamina (inikata.co.id) menjadi sorotan publik.

<sup>4</sup> Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Menjelaskan berbagai metode penelitian, termasuk penelitian kepustakaan.

<sup>5</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK RI. Menjelaskan dampak korupsi terhadap alokasi anggaran dan pelayanan publik.

dari negara. Secara keseluruhan kondisi ini menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi menurun, terutama dalam hal daya beli dan akses terhadap pelayanan sosial.<sup>6</sup>

Berikut Dampak Yang Dialami Masyarakat Akibat Korupsi :

#### 1. Menurunnya kualitas layanan publik

Korupsi mengakibatkan kerusakan serius pada pelayanan publik yang seharusnya menjadi hak seluruh warga negara. Dalam berbagai kasus, anggaran yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur publik seperti jalan, sekolah, rumah sakit, sistem air bersih, dan fasilitas umum lainnya dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, proyek-proyek tersebut dibangun dengan kualitas rendah, molor dalam pelaksanaan, bahkan seringkali tidak pernah selesai.<sup>7</sup>

Misalnya, dana pembangunan sekolah yang dikorupsi menyebabkan banyak sekolah tidak memiliki ruang kelas yang layak, kekurangan fasilitas dasar seperti meja, kursi, atau buku pelajaran. Begitu juga dengan sektor kesehatan, rumah sakit di daerah-daerah terpencil seringkali kekurangan obat-obatan, alat kesehatan, bahkan tenaga medis karena korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Ini mengakibatkan pelayanan kesehatan menjadi sangat minim dan masyarakat harus membayar mahal untuk layanan yang sebenarnya seharusnya mereka peroleh secara terjangkau atau gratis.<sup>8</sup>

Penurunan kualitas layanan publik juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat menjadi apatis, merasa bahwa pemerintah tidak mampu atau tidak peduli terhadap kebutuhan mereka. Dalam jangka panjang, penurunan kualitas layanan publik memperlebar kesenjangan antara masyarakat yang mampu mengakses layanan privat berkualitas dan masyarakat miskin yang harus puas dengan layanan publik yang buruk.<sup>9</sup>

#### 2. Rusaknya moral dan budaya

Dampak korupsi tidak hanya berhenti pada aspek material, tetapi juga menggerogoti nilai-nilai moral dan budaya dalam masyarakat. Ketika praktek korupsi terjadi secara terbuka tanpa sanksi yang tegas, masyarakat secara tidak langsung belajar bahwa kecurangan, suap, dan manipulasi adalah cara yang efektif untuk mencapai tujuan. Ini melahirkan budaya permisif, di mana nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keadilan dianggap kurang penting dibandingkan dengan pencapaian kekayaan atau kekuasaan<sup>10</sup>. Generasi muda yang melihat para pejabat atau tokoh masyarakat yang korupsi namun tetap dihormati atau tidak dihukum

---

<sup>6</sup> Wartabanjar (2025/02/27)kejagung-kerugian-negara-akibat-korupsi-pt-pertamina-patra-niaga-capai-rp9685-triliun/?utm\_source

<sup>7</sup> Zainudin Hasan. 2025. *Pend Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*, hal 66.

<sup>8</sup> Johnson, J. 2015. *Dasar-dasar manajemen risiko korupsi: Kerangka kerja untuk pengambilan keputusan dan integrasi ke dalam siklus proyek*. Edisi U4 No. 18. Chr. Michelsen Institute. Bergen.

<sup>9</sup> Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 4 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Laporan Data Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Bab I Ketentuan Umum, hal. 3.

<sup>10</sup> Sulaiman, A. (2020). *Korupsi dan Dekadensi Moral Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Menjelaskan bagaimana korupsi melemahkan moralitas masyarakat.

berat, akan cenderung meniru perilaku tersebut. Akhirnya, korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang harus diberantas, melainkan menjadi bagian dari “kebiasaan hidup” sehari-hari.<sup>11</sup>

Dalam masyarakat yang sudah mengalami kerusakan moral akibat korupsi, perilaku koruptif bisa merembet ke berbagai lini kehidupan, termasuk pendidikan, peradilan, perizinan, bahkan dalam hubungan sosial biasa. Orang menjadi terbiasa mencari “jalan pintas” untuk menyelesaikan masalah, tanpa memperhatikan norma dan hukum yang berlaku. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, akan sangat sulit membangun kembali budaya integritas dalam masyarakat.<sup>12</sup>

### 3. Akses bagi masyarakat miskin menjadi terbatas

Korupsi memperparah ketimpangan sosial karena membatasi akses masyarakat miskin terhadap layanan publik yang seharusnya membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk mendukung program-program kesejahteraan, seperti subsidi pendidikan, program kesehatan gratis, bantuan sosial, dan pengembangan ekonomi masyarakat, banyak yang dikorupsi. Alhasil, program-program tersebut berjalan setengah hati atau bahkan hanya menjadi formalitas belaka<sup>13</sup>.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat miskin mengalami beban berlipat. Mereka tidak hanya harus berjuang mengatasi kondisi ekonomi yang sulit, tetapi juga harus membayar lebih untuk mendapatkan hak dasar mereka. Misalnya, harus membayar pungutan liar untuk mengakses layanan kesehatan, membayar suap untuk mendapatkan dokumen penting seperti KTP atau akta kelahiran, atau tidak bisa mendapatkan bantuan sosial karena sistem distribusinya dikorupsi<sup>14</sup>.

Korupsi juga mempersempit kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, yang seharusnya menjadi jalan utama untuk meningkatkan taraf hidup. Tanpa pendidikan yang layak, mereka sulit bersaing dalam pasar tenaga kerja dan terjebak dalam siklus kemiskinan antargenerasi. Akibatnya, ketimpangan sosial semakin melebar dan potensi besar dari kelompok masyarakat ini untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa menjadi terhambat.<sup>15</sup>

### 4. Rusaknya berpikir logis

---

<sup>11</sup> Hartanto. (2017). *Korupsi Perbuatan Tak Bermoral Menjatuhkan Wibawa Bangsa dan Merampas Kesejahteraan Rakyat*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9543/HARTANTO.pdf?isAllowed=y&sequence=1> (202

<sup>12</sup> Zainudin Hasan. 2025. *Pend Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*, hal 78

<sup>13</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Kajian Dampak Korupsi terhadap Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: KPK RI.

Memberi data dan analisis lokal tentang bagaimana korupsi menghambat distribusi layanan sosial.

<sup>14</sup> Transparency International. (2013). *Global Corruption Barometer 2013*. Berlin: Transparency International. Laporan ini menyoroti pungutan liar dan suap dalam akses layanan publik, termasuk kesehatan dan dokumen administrasi.

<sup>15</sup> Zainudin Hasan. 2025. *Pend Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*, hal 66

Budaya yang telah lama berakar di Indonesia, yang berasal dari pandangan hidup nenek moyang dan mencerminkan kearifan lokal, dapat dengan cepat mengalami kerusakan dan hilang dari tanah kelahirannya. Namun, kerusakan ini bukan semata-mata disebabkan oleh pengaruh modernisme yang membawa berbagai inovasi dalam kehidupan, seperti teknologi, material, metode, peralatan, dan pemikiran baru. Sebaliknya, era modern justru memberikan peluang untuk meraih manfaat dalam usaha mempertahankan budaya yang telah ada<sup>16</sup>.

Fenomena ini bermula dari hal-hal kecil yang sering kita temui di sekitar kita, yaitu kebiasaan memberikan imbalan lebih kepada seseorang yang seharusnya sudah menerima upah untuk pekerjaan yang dilakukannya. Meskipun tugas tersebut merupakan kewajibannya sebagai seorang profesional, praktik memberikan sejumlah uang baik dalam urusan pembuatan dokumen di tingkat kelurahan, desa, hingga pemerintahan telah mengubah cara pandang kita.<sup>17</sup>

## V. KESIMPULAN

Kasus dugaan korupsi di Pertamina yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun memberikan dampak serius terhadap kesejahteraan masyarakat. Kerugian ini menyebabkan menurunnya kemampuan negara dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu menyediakan subsidi dan layanan publik. Sektor-sektor vital seperti energi, pendidikan, dan kesehatan mengalami pemangkasan anggaran, sehingga akses masyarakat terhadap layanan dasar menjadi terbatas. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling terdampak karena sangat bergantung pada subsidi dan program bantuan pemerintah. Selain kerugian finansial, kasus ini juga menciptakan krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara dan BUMN. Masyarakat semakin skeptis terhadap integritas pejabat publik, terutama ketika pelaku korupsi tidak mendapat hukuman setimpal. Secara sosial, korupsi menormalisasi perilaku menyimpang seperti suap dan gratifikasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya merusak nilai moral dan logika berpikir masyarakat, khususnya generasi muda. Korupsi juga memperparah ketimpangan sosial karena mempersempit kesempatan masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan demikian, kasus korupsi ini menunjukkan pentingnya reformasi tata kelola BUMN, peningkatan transparansi publik, dan penegakan hukum yang tegas serta berkeadilan untuk mencegah kerugian serupa di masa mendatang.

---

<sup>16</sup> Hadi, S. (2018). *Modernisasi dan Perubahan Sosial Budaya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Menjelaskan dampak modernisasi terhadap budaya lokal dan cara mempertahankannya.

<sup>17</sup> Wahyuni Saputri<sup>1</sup>, Zainudin Hasan<sup>2</sup>. 2024. *Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini* Di Lembaga Pendidikan. hal 4

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2017). *Kepemimpinan dan Integritas dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Arifin, Z. (2014). *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Damanik, JP (2015). *Pemberantasan Korupsi: Antara Sistem Pengawasan dan Kepemimpinan Etis*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Hasan, Z. (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 828-831.
- Hasan, Zainudin, dkk. "Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Membentuk Karakter Generasi Penerus Bangsa." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2.2 (2024): 241-255.
- Hasan, Zainudin, Sannyah Majidah, Aldi Yansah, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, and Made Sera Wirantika. "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 44-54.
- Indriyanto, S. (2014). *Budaya Antikorupsi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Hukum Fakultas Universitas Indonesia.
- Lickona, T. (1991). *Mendidik untuk Karakter: Bagaimana Sekolah Kita Dapat Mengajarkan Rasa Hormat dan Tanggung Jawab*.
- Nugroho, R. (2015). *Kepemimpinan Antikorupsi: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Pers Universitas Gadjah Mada
- Prasetyo, T. (2013). *Tata Kelola Organisasi yang Baik sebagai Pilar Pencegahan Korupsi*.
- Suyanto, B. (2010). *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: Pemberantasan dan Pencegahan di Indonesia*. Surabaya: Pers Universitas Airlangga.